

Partai Gerindra Klaim Sandiaga Uno Tetap Dukung Prabowo Jadi Capres

JAKARTA (IM) - Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan isi pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Dalam pertemuan itu, Sandiaga menyatakan diri loyal kepada Gerindra dan Prabowo.

“Yang saya tau bahwa yang bersangkutan itu menyatakan bahwa masih tunduk kepada garis partai dan loyal kepada Pak Prabowo serta mendukung pencalonan Pak Prabowo sebagai presiden,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/1).

Kendati demikian, Dasco belum bisa memastikan apakah hal itu berarti Sandiaga tetap berada di Partai Gerindra hingga Pemilu 2024.

Seperti diketahui, belakangan nama Sandiaga ramai diberitakan lantaran isu berpindahannya dari Gerindra ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk maju sebagai capres 2024.

“Ya saya kan menyam-

paikan apa yang disampaikan bersangkutan kepada Pak Prabowo. Kalau itu kemudian menjamin bahwa dia akan tetap (di Gerindra atau tidak) saya tidak bisa jamin. Tanya saja kepada Mas Sandi,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR itu menerangkan, pertemuan dengan Prabowo tersebut juga diinisiasi oleh Sandi.

“Dan sudah diberi waktu dan sudah ketemu sama Pak Prabowo,” katanya. Sebelumnya diberitakan, pertemuan kedua tokoh politik ini diketahui dari unggahan di akun Instagram Sandi @sandiuono. Pertemuan ini terjadi di tengah-tengah isu merapatnya Sandiaga meninggalkan Gerindra ke PPP berkaitan Pilpres 2024.

“Terima kasih Pak @prabowo telah berkenan menerima buku 1500 Inspirasi: Jelajah Perjalanan Sandiaga Uno. Buku ini adalah catatan perjalanan semasa kampanye pilpres tahun 2019,” tulis Sandiaga dalam postingan akun Instagramnya yang dikutip pada Kamis (12/1). ● mei

Pesawat C-130J Super Hercules Pesanan TNI AU Segera Tiba

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo memastikan bahwa pesawat C-130J Super Hercules pesanan Indonesia segera tiba. Kepastian ini diungkap Fadjar saat berkunjung ke kantor pusat Perhimpunan Purnawirawan TNI AU (PPAU), Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (12/1).

“Dalam waktu dekat akan hadir alutsista baru, di antaranya pesawat C-130J,” ujar Fadjar, dikutip dari siaran pers Dinas Penerangan AU, Jumat (13/1).

Dalam kesempatan itu, Fadjar menyampaikan komitmennya untuk mengembangkan TNI AU. “Baik bidang organisasi, alutsista mau-

pun sumber daya manusia (SDM),” kata Fadjar.

Rencananya, unit pertama pesawat yang diproduksi Lockheed Martin tersebut akan dikirimkan ke Indonesia antara Februari dan Maret 2023. Director of Business Development Air Mobility and Maritime Missions Lockheed Martin Richard C Johnston mengatakan, Indonesia telah memesan lima unit pesawat C-130J Super Hercules bagi TNI AU.

“Pengiriman pertama pada Februari-Maret tahun depan, kemudian pesawat berikutnya akan dikirim secara bertahap,” kata Johnston dalam acara Indo Defence 2022 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, pada 2 November 2022 lalu. ● mei



FOTO: ANT

SIDANG KASUS SUAP JUAL BELI JABATAN DI PEMKAB PEMALANG

Terdakwa Komisaris PD Aneka Usaha (PDAU) Adi Jumal Widodo tiba untuk menjalani sidang secara virtual dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/1). Mukti Agung Wibowo dan Adi Jumal Widodo menjalani sidang dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan nilai total suap mencapai Rp6,1 Miliar.

Permohonan Perlindungan LPSK Meningkat 232 Persen pada 2022

JAKARTA (IM) - Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) mencatat kenaikan permohonan perlindungan sebesar 232 persen pada 2022. Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan, sebanyak 7.777 permohonan perlindungan diterima sepanjang tahun 2022, sementara pada 2021 hanya berjumlah 2.341 permohonan.

“Dibandingkan jumlah permohonan 2021, yang berjumlah 2.341, maka pada 2022 permohonan mengalami peningkatan 232 persen,” kata Hasto dalam catatan refleksi LPSK 2022 yang digelar di Kantor LPSK, Jumat (13/1).

Hasto menjelaskan, peningkatan jumlah permohonan tersebut didominasi oleh kasus robot trading atau investasi ilegal yang banyak terjadi pada 2022. Dari 7.777 permohonan yang diterima, terdapat permohonan kasus investasi ilegal sebanyak 3.725. Hasto juga menjelaskan, tidak seluruhnya permohonan diterima oleh LPSK bisa ditindaklanjuti.

“Diadministrasikan se-

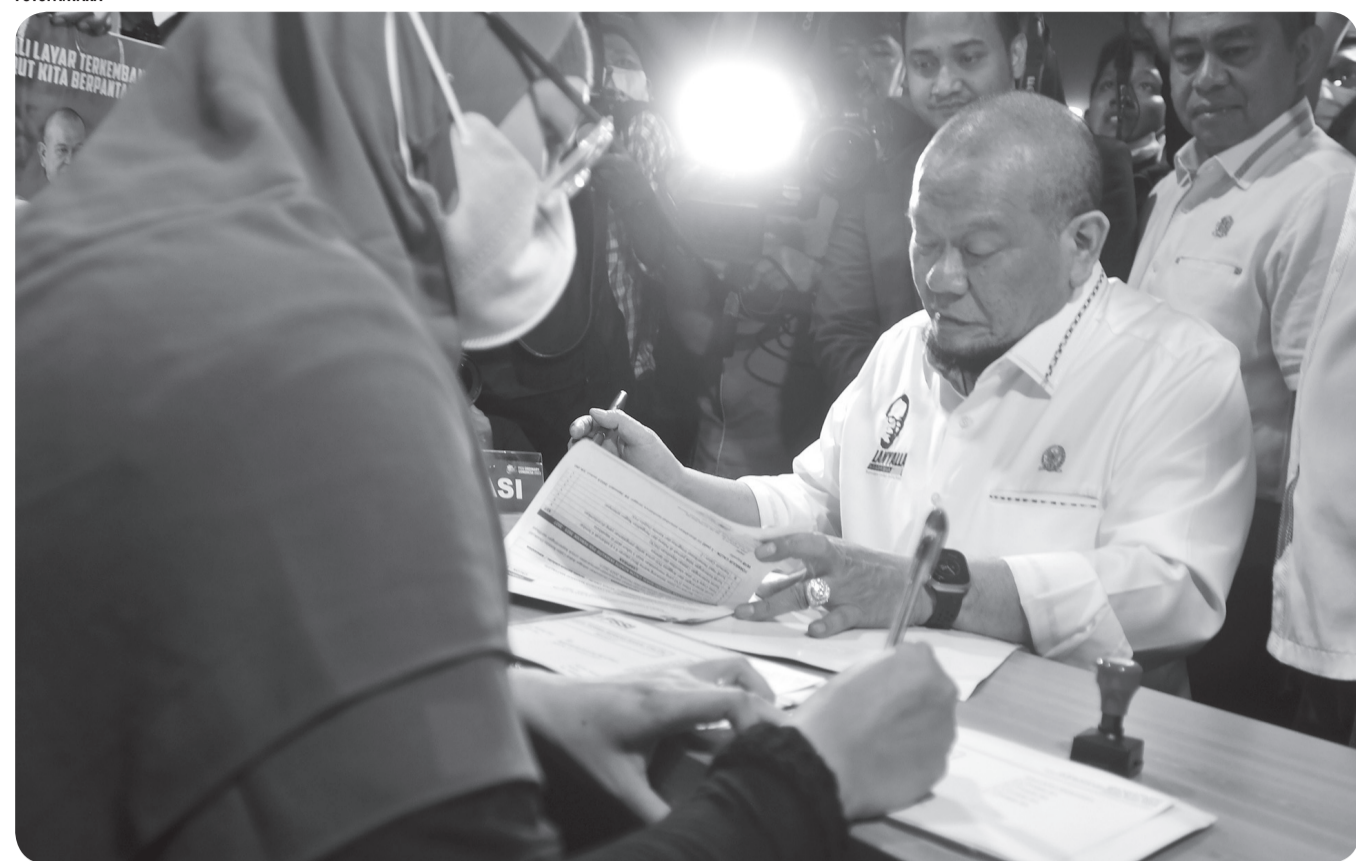
bagai permohonan yang ditindaklanjuti dengan penelaahan sebanyak 6.104 permohonan. Sedangkan sebanyak 1.673 lainnya dikategorikan sebagai permohonan yang tidak lengkap,” tutur Hasto.

Dia menambahkan, jumlah pemohon terbesar disampaikan melalui surat sebanyak 2.514, disusul pemohon melalui pesan WhatsApp 1.166, pemohon dengan aplikasi permohonan perlindungan 193, dan surat elektronik sejumlah 154 pemohon.

Hasto menjelaskan, terjadi kenaikan pengaduan yang datang langsung dibandingkan 2021 karena kondisi pandemi Covid-19 yang mulai reda pada 2022. Selain itu, jumlah pemohon yang memanfaatkan teknologi daring terus meningkat, khususnya melalui pesan WhatsApp. “Hal ini menunjukkan bahwa media permohonan LPSK melalui aplikasi Whatsapp efektif menjadi kanal pengaduan masyarakat,” ujar Hasto. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



LA NYALLA CALONKAN DIRI JADI KETUA UMUM PSSI

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti (kanan) menyerahkan form dan berkas pendaftaran calon Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 di Kantor PSSI, GBK Arena, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1). La Nyalla masuk menjadi salah satu kandidat calon Ketua Umum PSSI yang akan dipilih pada Kongres Luar Biasa (KLB) pada 16 Februari 2023.

Puan Bingung, Merasa Sudah Kerja Keras Tetap Banyak Orang Tak Menyukainya

Puan Maharani bingung kenapa banyak orang yang tak suka kepadanya. Padahal ia sudah kerja keras untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

JAKARTA (IM) - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku sadar banyak orang yang tak suka pada dirinya. Hal itulah yang membuatnya bingung kenapa banyak mendapat komentar negatif dari publik.

Pada hal itu, Puan, merasa sudah bekerja keras turun ke masyarakat dan berupaya mengentaskan berbagai persoalan. “Merasalah (banyak orang tak suka). Bingung juga, nggak tahu kenapa. Kayaknya sudah berusaha kerja benar, kemudian kerja ke lapangan,” kata Puan dalam acara Rosi Kompas TV, dikutip Jumat (13/1).

Memang, kata Puan, diri-

nya tak bisa menyelesaikan semua masalah yang menu-rutnya begitu banyak. Namun, dia mengaku berusaha untuk menyapa rakyat, mendengar aspirasi warga, dan mengetahui kondisi masyarakat di lapangan.

Dengan kerja kerasnya itu, Puan merasa dirinya tetap selalu salah dalam pandangan sejumlah orang.

“Kayaknya memang yang udah nggak suka tetep aja nggak suka. Udah nggak lihat lagi apa yang dilakukan oleh Puan Maharani, tapi dia selalu salah aja,” ujarnya.

Ketua DPR RI itu mengatakan, tidak semua langkah dan kebijakan yang dia

ambil bisa menyenangkan banyak orang. Kendati banyak yang berkomentar negatif, Puan bilang, dirinya akan tetap bekerja keras untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

“Kan kita juga nggak bisa bikin senang semua orang suka, jadi saya terus aja jalan, terus aja turun ke bawah, menyapa masyarakat, ketemu dengan masyarakat. Udah itu aja yang bisa saya lakukan,” tutur anak bungsu Megawati Soekarnoputri itu.

Seperti diketahui, nama Puan Maharani seolah tak pernah lepas dari sorotan publik, utamanya di media sosial. Akhir September lalu misalnya, di media sosial Twitter viral video Puan bagi-bagi kaus ke warga. Dalam video itu, tampak Puan melemparkan kaus dengan muka cemberut.

Tak lama setelah peristiwa itu, Puan lagi-lagi mendapat sorotan publik. Kali ini, videonya

menanam padi di sawah viral di media sosial. Dalam video tersebut, Puan turun ke sawah di Desa Adat Sedang, Abian-samel, Badung, Bali.

Namun cara Puan mena-

nam padi dinilai tak selazim. Puan menancapkannya tanaman padi dengan berjalan maju, bukan mundur seperti umumnya dilakukan petani. ● han

Terungkap Adanya Aliran Uang dari Bupati Bangkalan ke Oknum Anggota KPU

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan suap Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) kepada oknum anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan.

Dugaan suap ini terungkap setelah penyidik KPK memeriksa anggota KPU Bangkalan bernama Sairil Munir sebagai saksi. KPK menduga aliran uang ke oknum KPU Bangkalan tersebut bertujuan membuat survei elektabilitas R Abdul Latif Amin Imron.

“Sairil Munir (anggota KPU Bangkalan), saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan adanya aliran uang dari tersangka RALAI ke pihak tertentu di KPU Kabupaten Bangkalan untuk membuat survei elektabilitas bagi tersangka dimaksud,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (13/1).

Sebelumnya, Ketua KPK Firlil Bahuri sempat mengungkap adanya aliran uang suap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron sebesar Rp5,3 miliar yang digunakan untuk kepentingan survei elektabilitas. Uang itu diduga bersumber dari suap lelang

jabatannya di lingkungan Pemkab Bangkalan.

“Salah satunya uang suap tersebut dipakai untuk membayar lembaga survei elektabilitas,” kata Firlil, Kamis 8 Desember 2022.

Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait lelang jabatan dan pengatur proyek di lingkungan Bangkalan.

Selain Abdul Latif Amin Imron, KPK juga menetapkan lima orang tersangka lainnya. Mereka adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan, Agus Eka Leandy; Kadis PUPR Bangkalan, Wildan Yulianto.

Kemudian, Kadis Ketahanan Pangan Bangkalan, Achmad Mustaqim; Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan, Hosin Jamili; serta Kadis Lerindustri dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan, Salman Hidayat.

Dalam perkara ini, Abdul Latif Amin Imron diduga menerima suap Rp5,3 miliar melalui orang kepercayaan. Uang suap itu berkaitan dengan lelang jabatan serta pengaturan proyek di Bangkalan. ● han

KPK Telah Mengendus Jejak Pelarian Buronan Penyup AKBP Bambang Kayun

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengendus jejak pelarian hingga komunikasi terakhir pasangan suami istri (pasutri), buronan Bareskrim Polri, Emilia Said dan Herwansyah.

Emilia Said dan Herwansyah merupakan tersangka penyup Perwira Polisi, AKBP Bambang Kayun (BK).

Jejak pelarian hingga komunikasi terakhir pasangan tersebut dikantongi KPK dari seorang saksi, Ibu Rumah Tangga (IRT) Sintasari.

KPK mengantongi informasi bahwa Sintasari pernah berkomunikasi dengan pasangan buronan mabes Polri tersebut. KPK langsung mengonfirmasi informasi tersebut ke Sintasari.

“Sintasari (Ibu Rumah Tangga), saksi hadir dan didalami pengetahuannya

antara lain terkait dengan interaksi komunikasi saksi dengan Emilia Said dan Herwansyah yang menjadi DPO Penyidik Bareskrim Mabes Polri,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (13/1).

Sementara itu, terdapat satu saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi Bambang Kayun.

Saksi tersebut yakni, seorang Pengacara Akhmad Kholid. KPK bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Akhmad Kholid. “Akhmad Kholid (Pengacara), saksi tidak hadir dan konfirmasi untuk di jadwal ulang,” terang Ali.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan oknum Perwira Polisi AKBP Bambang Kayun (BK) se-

bagai tersangka penerima suap dan gratifikasi pengurusan perkara.

Bambang Kayun diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp56 miliar hingga mobil mewah.

Bambang Kayun disinyalir menerima suap sebesar Rp6 miliar ditambah satu unit mobil mewah dari tersangka Polri, Emilia Said (ES) dan Herwansyah (HW) secara bertahap.

Emilia dan Herwansyah merupakan pasangan suami istri yang sedang berperkaradi Polri.

Adapun, suap tersebut berkaitan dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (PT ACM).

Atas ulahnya Bambang Kayun, pasangan suami istri tersebut berhasil kabur ke luar negeri. Pihak kepolisian hingga kini masih memburu pasutri tersebut. ● lus



FOTO: ANT

UNJUK RASA TOLAK KEBIJAKAN PJ GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

Pengunjuk rasa melakukan orasi di kantor sementara Gubernur Papua Barat Daya di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (13/1). Tim Deklarator dan Tim Presidium pemekaran Provinsi Papua Barat Daya melakukan aksi unjuk rasa memprotes kebijakan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya yang dianggap tidak mengakomodir Otsus dalam pengisian jabatan eselon II dan eselon III provinsi tersebut.

PENGUMUMAN

Direksi PT Sicepat Ekspres Indonesia (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan rencana perubahan pengendalian atas Perseroan yang akan dilakukan melalui perubahan klasifikasi saham Perseroan milik PT Sinergi Cepat Indonesia (“PT SCI”) yang sebelumnya tanpa hak suara menjadi memiliki hak suara.

Sehubungan dengan perubahan klasifikasi saham Perseroan tersebut maka PT SCI akan menjadi pengendali baru Perseroan sejak tanggal efektif perubahan klasifikasi saham Perseroan.

Perubahan klasifikasi saham Perseroan tersebut tunduk pada persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Perubahan klasifikasi saham Perseroan akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya (i) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”), dan (ii) Anggaran Dasar Perseroan.

Apabila terdapat kreditur yang berkeberatan atas pengalihan saham tersebut, maka para kreditur dapat mengajukan keberatan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ini disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung kepada Perseroan dengan alamat:

PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA

Jl. Ir. H. Juanda III Nomor 17-19, RT 008 RW 002, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10120.

Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam UUPT.

Jakarta, 14 Januari 2023

Direksi
PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT. SUMALOK PERSADA ENERGI, berkedudukan di Kota Depok (“Perseroan”) mengumumkan bahwa akan dilakukan pengambilalihan terhadap sebagian besar saham dalam Perseroan yang mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali pada Perseroan.

Bagi setiap pihak yang berkeberatan, dapat mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 14 hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada PT. SUMALOK PERSADA ENERGI dengan alamat : Jl. Raya Kartini Nomor 21 A, RT.002/RW.009, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Depok, 14 Januari 2023

Direksi